

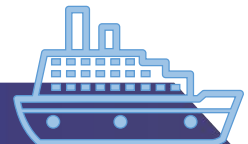


**DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



ARAH PENGEMBANGAN KEBUTUHAN STUDI TRANSPORTASI LAUT PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JAKARTA, FEBRUARI 2019





LOGISTIC PERFORMANCE INDEX (LPI) 2018



Country	LPI Rank 2018	LPI Score	Customs	Infrastructure	International shipments	Logistics competence	Tracking & tracing	Timeliness
Germany	1	4.2	4.09	4.37	3.86	4.31	4.24	4.39
Sweden	2	4.05	4.05	4.24	3.92	3.98	3.88	4.28
Belgium	3	4.04	3.66	3.98	3.99	4.13	4.05	4.41
Austria	4	4.03	3.71	4.18	3.88	4.08	4.09	4.25
Japan	5	4.03	3.99	4.25	3.59	4.09	4.05	4.25
Singapore	7	4	3.89	4.06	3.58	4.1	4.08	4.32
Thailand	32	3.41	3.14	3.14	3.46	3.41	3.47	3.81
Vietnam	39	3.27	2.95	3.01	3.16	3.4	3.45	3.67
Malaysia	41	3.22	2.9	3.15	3.35	3.3	3.15	3.46
Indonesia	46	3.15	2.67	2.89	3.23	3.1	3.3	3.67
Philippines	60	2.9	2.53	2.73	3.29	2.78	3.06	2.98

LPI DITETAPKAN BERDASARKAN 6 KOMPONEN:

Efisiensi dari *customs* dan *border management clearance*, Kualitas perdagangan & infrastruktur transportasi, Kemudahan dalam menentukan biaya pengangkutan melalui laut yang kompetitif, Kompetensi dan kualitas pelayanan di bidang logistik, Kemampuan dalam melacak dan memonitor pengiriman barang dan Frekuensi pelayaran yang memuaskan pengguna jasa



Logistic Performance Index (LPI) Indonesia mengalami peningkatan Peringkat, dari tahun 2016 pada peringkat ke 63 dari 160 negara, menjadi peringkat ke 46 dari 160 negara pada tahun 2018



KEBIJAKAN NASIONAL TRANSPORTASI LAUT NASIONAL PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO – JUSUF KALLA PERIODE 2014-2019

NAWA CITA

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter Bangsa;
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKTOR TRANSPORTASI (LAUT)

- ⊙ Pembangunan Transportasi Multimoda dan mendukung Sislognas, kawasan industri.
- ⊙ Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
- ⊙ Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
- ⊙ Membangun sistem dan jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
- ⊙ Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut
- ⊙ Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi laut yang ramah lingkungan





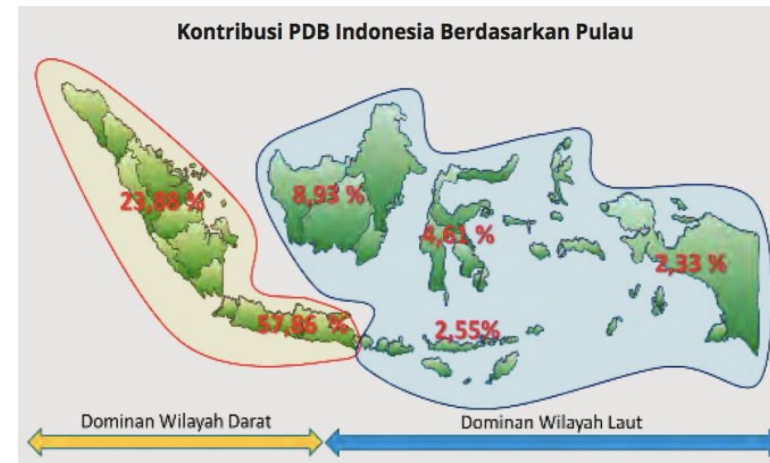
KONSEPSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM

PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT SEBAGAI TULANG PUNGGUNG PENGEMBANGAN WILAYAH



INDONESIA TERLETAK PADA LOKASI STRATEGIS DALAM RUTE PERDAGANGAN DUNIA MENINGGAT 90% PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI JALUR LAUT DIMANA 40% -NYA MELEWATI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

PERKEMBANGAN SEKTOR MARITIM NASIONAL MASIH SANGAT TERBATAS. UNTUK MENJADI SEBUAH NEGARA MARITIM, INDONESIA HARUS MAMPU MENGOPTIMALKAN WILAYAH LAUT SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN KEKUATAN EKONOMI, GEOPOLITIK, BUDAYA BAHARI MAUPUN PERTAHANAN KEAMANAN



PELAYANAN TRANSPORTASI LAUT DOMESTIK MASIH TERPUSAT PADA WILAYAH YANG MEMILIKI AKTIFITAS EKONOMI TINGGI YAITU DI WILAYAH BARAT INDONESIA MESKIPUN KARAKTERISTIK KEPULAUAN DI WILAYAH TIMUR INDONESIA TELAH MENJADIKAN TRANSPORTASI LAUT SEBAGAI TULANG PUNGGUNG AKTIVITAS PERGERAKANNYA

DIPERLUKAN UPAYA PENGEMBANGAN KAWASAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH TIMUR INDONESIA DENGAN DIDUKUNG PELAYANAN TRANSPORTASI LAUT SEBAGAI TULANG PUNGGUNG DISTRIBUSI LOGISTIK YANG MENGHUBUNGAN WILAYAH BARAT DAN TIMUR INDONESIA SEHINGGA MAMPU MENURUNKAN BIAYA LOGISTIK GUNA MEMPERCEPAT PEMERATAAN PEREKONOMIAN



1

**DUKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DALAM PENINGKATAN
*LOGISTIC PERFORMANCE INDEX (LPI)***

→ PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN





KONDISI KEPELABUHANAN NASIONAL SAAT INI

PERAN PELABUHAN DI INDONESIA

PERAN PELABUHAN DI INDONESIA :

1

SIMPUL DALAM JARINGAN TRANSPORTASI SESUAI DENGAN HIERARKINYA

2

PINTU GERBANG KEGIATAN PEREKONOMIAN

3

TEMPAT KEGIATAN ALIH MODA TRANSPORTASI

4

PENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI DAN/ATAU PERDAGANGAN

5

TEMPAT DISTRIBUSI, PRODUKSI, DAN KONSOLIDASI MUATAN ATAU BARANG

6

MEWUJUDKAN WAWASAN NUSANTARA DAN KEDAULATAN NEGARA

RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

LOKASI & HIERARKI - KEBIJAKAN UTAMA

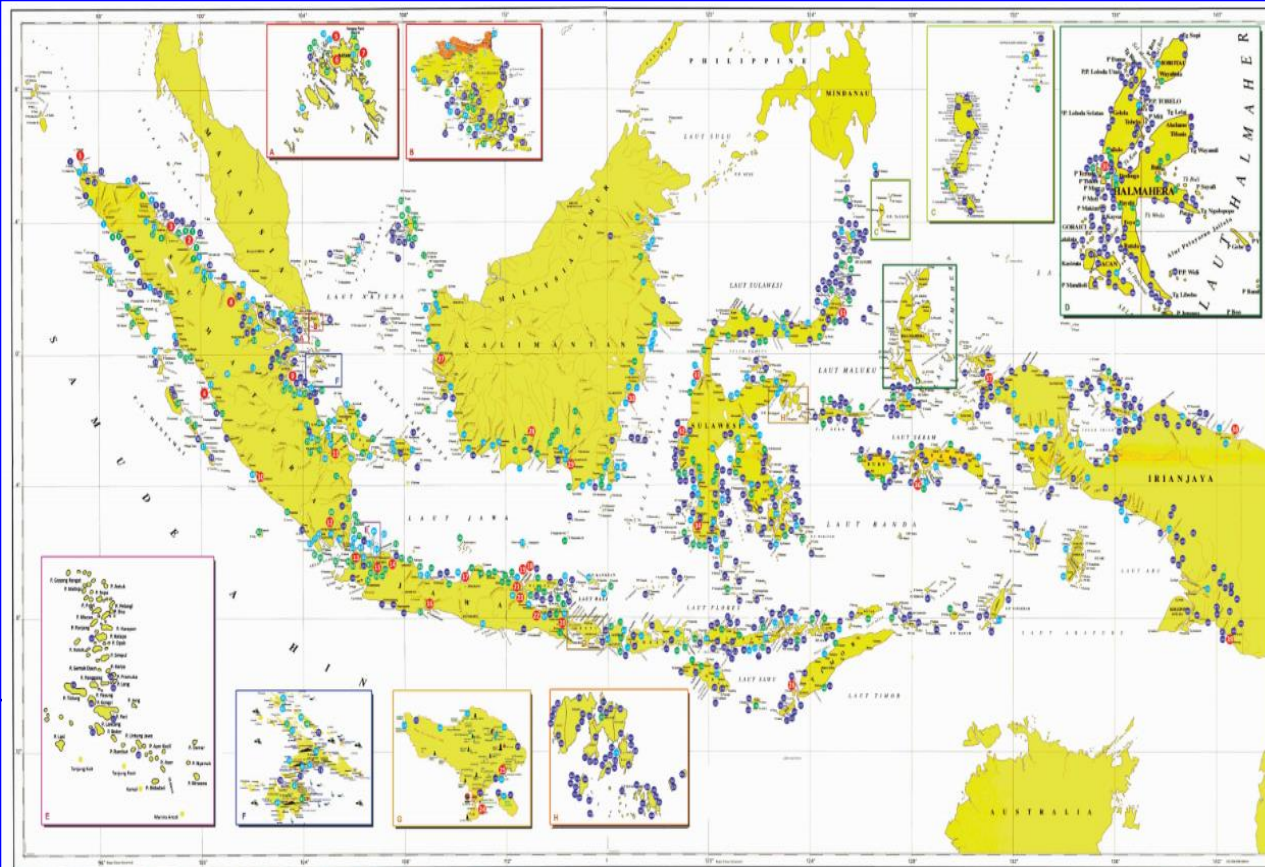
SAMPAI 2037

28 PELABUHAN UTAMA

164 PELABUHAN PENGUMPUL

166 PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

278 PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL



SESUAI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 432 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL diarahkan dalam upaya:

1. MENDORONG INVESTASI SWASTA
2. MENDORONG PERSAINGAN
3. PEMBERDAYAAN PERAN PENYELENGGARA PELABUHAN
4. TERWUJUDNYA INTEGRASI PERENCANAAN
5. MENCIPTAKAN KERANGKA KERJA HUKUM DAN PERATURAN YANG TEPAT SERTA FLEKSIBEL
6. MEWUJUDKAN SISTEM OPERASI PELABUHAN YANG AMAN, TERJAMIN SERTA OPTIMAL
7. MENINGKATKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
8. MENGEMBANGKAN SUMBERDAYA MANUSIA



1

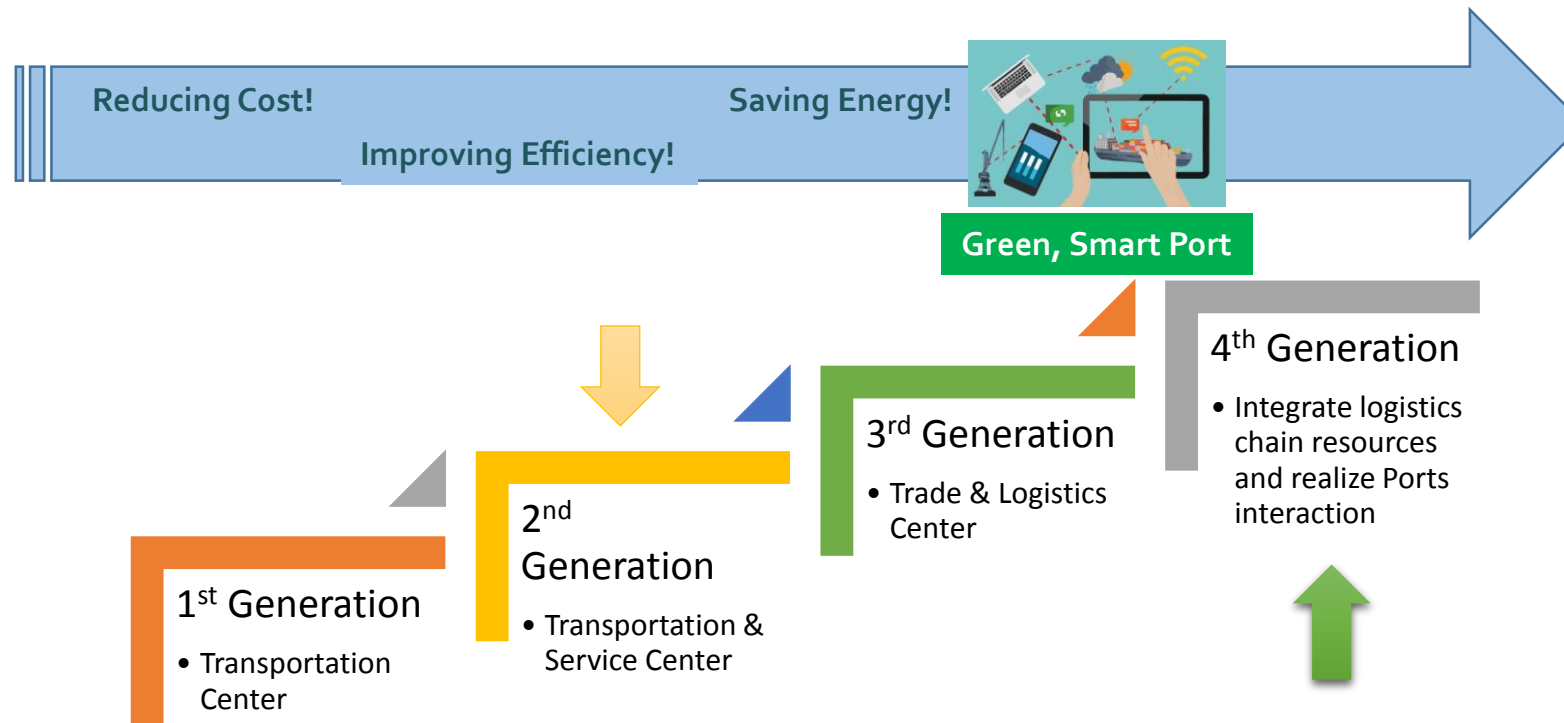
**DUKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DALAM PENINGKATAN
*LOGISTIC PERFORMANCE INDEX (LPI)***

**→ PENINGKATAN KEMUDAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN
BIDANG LOGISTIK**



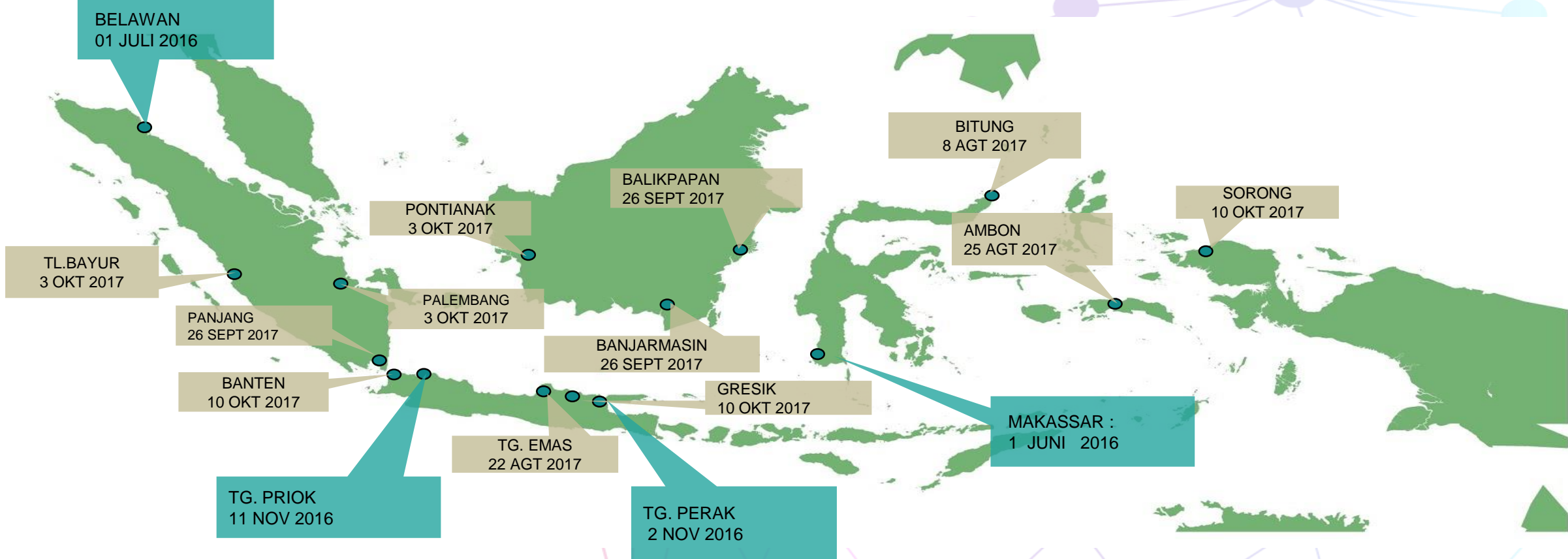


MODERNISASI PELABUHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM Mendukung LOGISTIK NASIONAL





PENERAPAN INAPORTNET (16 PELABUHAN)



Menurunkan Biaya Logistik dengan memangkas biaya Operasional



Sebagai langkah Transparansi Waktu Pelayanan dan Tarif yang dikenakan



Pelayanan yang Lebih Murah dan mudah



Meningkatkan Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan



Pelayanan Lebih Cepat dari 1-3 hari menjadi 30 Menit



Peningkatan pelayanan barang di Pelabuhan

Pengembangan Inaportnet 2019



Implementasi inaportnet kapal di 1 pelabuhan kelas 1 dan 10 pelabuhan kelas 2



Integrasi dengan PWMS Menko Maritim



Update beberapa service integrase dengan BUP dan Tersus/TUKS



Penyempurnaan module – mudule yang ada pada inaportnet untuk memperlancar kegiatan di UPT

Rencana Pengimplementasian Inaportnet Sampai Dengan Tahun 2024

2019

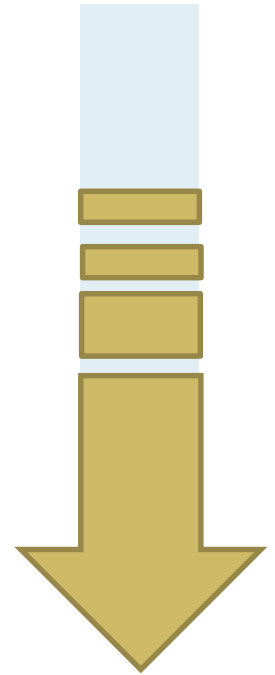
2 Pelabuhan Kelas I
11 pelabuhan Kelas II

2020 - 2021

1 Kanpel
4 UPP Kelas I
16 Pelabuhan KSOP Kelas III

2022-2024

48 Pelabuhan KSOP Kelas IV
40 Pelabuhan UPP Kelas II



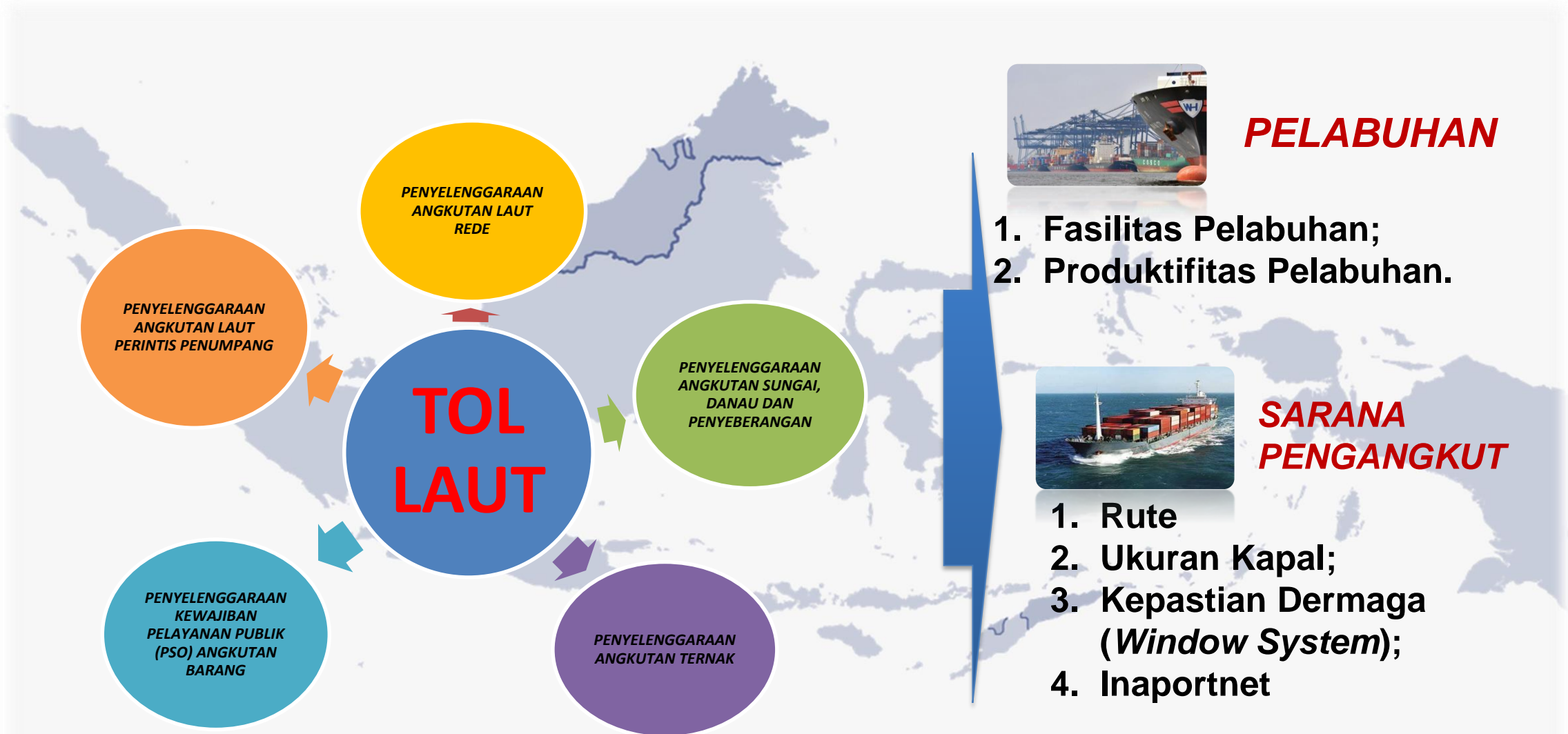


2

**DUKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DALAM PENINGKATAN
*LOGISTIC PERFORMANCE INDEX (LPI)***

**→ PENINGKATAN FREKUENSI PELAYARAN UNTUK MENUNJANG
LOGISTIK NASIONAL**





PELABUHAN

1. Fasilitas Pelabuhan;
2. Produktifitas Pelabuhan.



SARANA PENGANGKUT

1. Rute
2. Ukuran Kapal;
3. Kepastian Dermaga (*Window System*);
4. Inaportnet



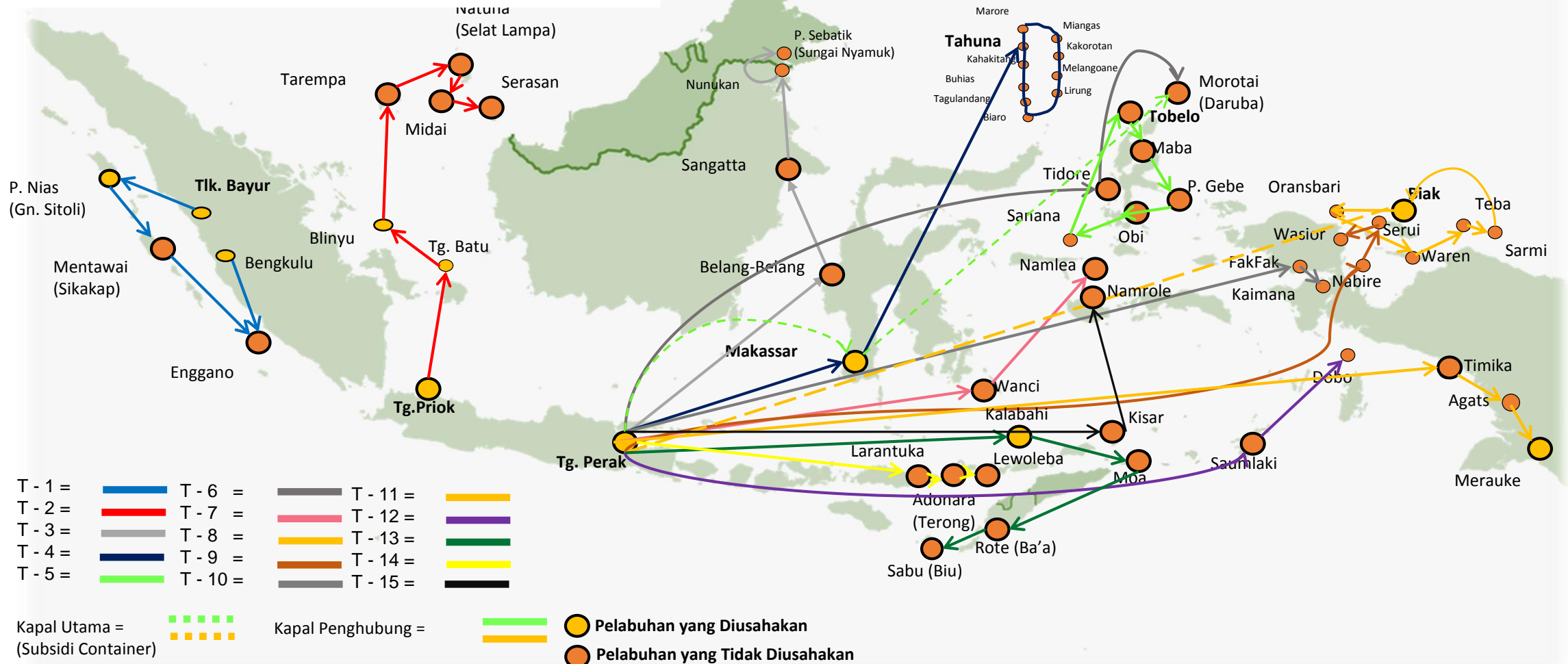
TRAYEK PENYELENGGARAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT (TOL LAUT) (18 TRAYEK)

Trayek Penugasan Pelni = 6 Trayek (T-2, T-4, T-6, T-13, T-14, T1-5)

Trayek Penugasan ASDP = 2 Trayek (T-1, T-3)

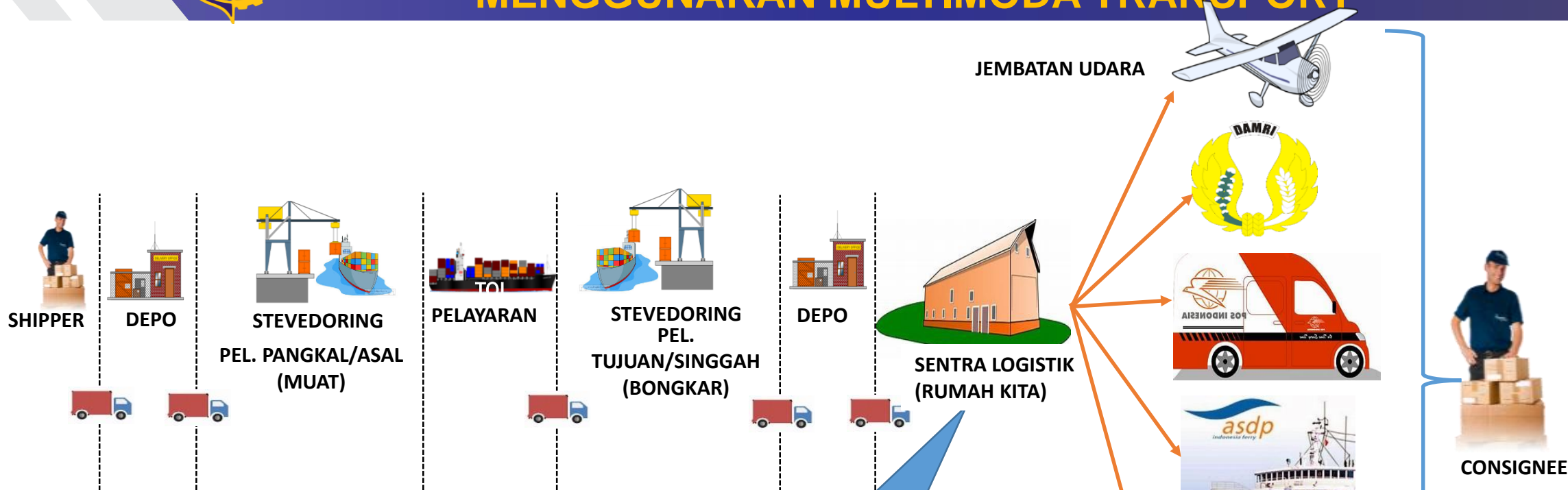
Trayek Penugasan Djakarta Lloyd = 3 Trayek (T-16, T-17 dan T-18)

Trayek Pelelangan Swasta = 7 Trayek (T-5, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12)





CONNECTIVITY END TO END MENGUNAKAN MULTIMODA TRANSPORT

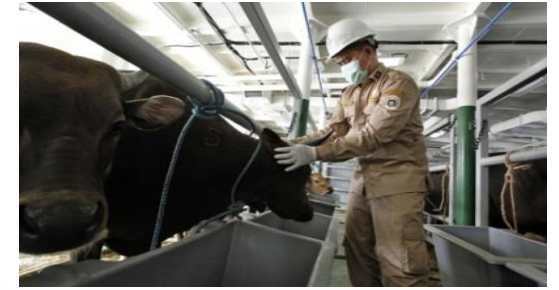
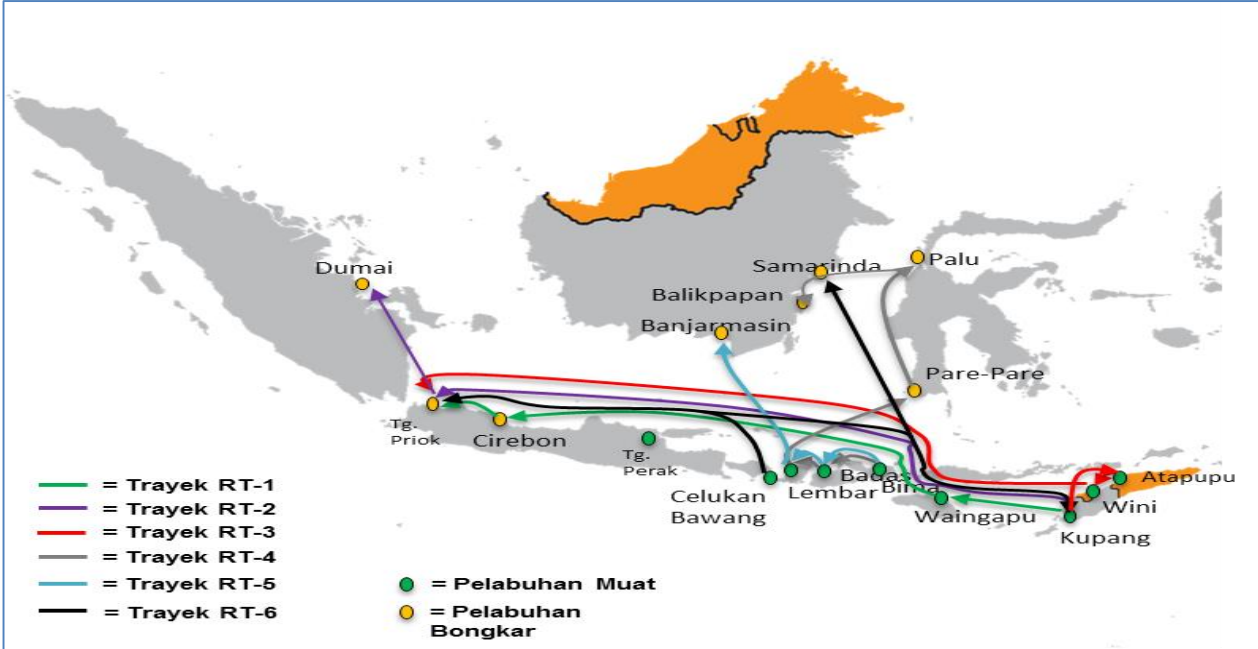


OPTIMALISASI PERAN BUMN LOGISTIK DALAM PROGRAM RUMAH KITA

1. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
2. Perum BULOG
3. PT. Rajawali Nusantara Indonesia
4. PT. Semen Indonesia
5. PT. Pos Logistik Indonesia
6. PT. Pertamina
7. PT. PELINDO I (PT. Prima Indonesia logistik)
8. PT. PELINDO II (PT. Multi Terminal Indonesia)
9. PT. PELINDO III (PT. Berkah Multi Cargo)
10. PT. PELINDO IV (PT. Nusantara Terminal Services)
11. PT. PELNI (PT. Sarana Bandar Nasional)
12. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
13. Perum DAMRI



PENYELENGGARAAN KAPAL ANGKUTAN TERNAK



SASARAN YANG INGIN DICAPAI:

- DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN NASIONAL SWASEMBADA DAGING SAPI DAN KERBAU;
- MENJAMIN KELANGSUNGAN DISTRIBUSI DAGING SAPI/KERBAU MELALUI ANGKUTAN LAUT;
- ANIMAL WELFARE.

KM. CAMARA NUSANTARA 1

KAPASITAS 500 EKOR SAPI

TA 2017



1 TRAYEK

(DILAYANI OLEH PT. PELNI (PELELANGAN UMUM))



4 PELABUHAN MUAT



4 PELABUHAN BONGKAR



TA 2018



6 TRAYEK

- 2 TRAYEK DILAYANI OLEH PT. PELNI (PENUGASAN);
- 2 TRAYEK DILAYANI OLEH PT. ASDP (PENUGASAN);
- 2 TRAYEK DILAYANI OLEH PERUSAHAAN SWASTA (PELELANGAN UMUM)



9 PELABUHAN MUAT



8 PELABUHAN BONGKAR

PENYELENGGARAAN KAPAL KHUSUS ANGKUTAN TERNAK TA. 2019



Mendukung Kebijakan Nasional Swasembada Daging Sapi Dan Kerbau



Menjamin Kelangsungan Distribusi Daging Sapi/Kerbau Melalui Angkutan Laut



Animal Welfare

No.	Pangkalan/ Provinsi	Kode Trayek	Nama Kapal	Jaringan Trayek	Mekanisme Pengadaan	PROGRES PENYELENGGARAAN
1	Kupang, NTT	RT-1	KM. Camara Nusantara 1	Kupang -201- Waingapu -867- Tanjung Priok -150- Cirebon -1038- Kupang	Penugasan PT. PELNI	SUDAH KONTRAK
2	Kupang, NTT	RT-2	KM. Camara Nusantara 3	Kupang -99- Wini -26- Atapupu - 1121-Tanjung Priok -1054- Kupang	Pelelangan Umum	PROSES LELANG
3	Kupang, NTT	RT-3	KM. Camara Nusantara 2	Kupang -201- Waingapu -867- Tanjung Priok -150- Cirebon -1038- Kupang	Pelelangan Umum	PROSES LELANG
4	Kupang, NTT	RT-4	KM. Camara Nusantara 4	Kupang -99-Wini -26- Atapupu - 955,5- Samarinda / Balikpapan - 782,5- Kupang	Pelelangan Umum	PROSES LELANG
5	Kupang, NTT	RT-5	KM. Camara Nusantara 6	Kupang -720- Banjarmasin -429- Bima -429- Banjarmasin -720- Kupang	Pelelangan Umum	PROSES LELANG
6	Surabaya, Jatim	RT-6	KM. Camara Nusantara 5	Surabaya -263- Banjarmasin -263- Surabaya -441- Soekarno Hatta (Makassar) -304- Palu -193/172 – Balikpapan / Samarinda -475/533- Surabaya	Penugasan PT. ASDP	SUDAH KONTRAK



Ket : Trayek sudah beroperasi



PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS



113 TRAYEK

ANGKUTAN LAUT PERINTIS

46 TRAYEK

DILAYANI OLEH PT. PELNI (PENUGASAN)

67 TRAYEK

DILAYANI OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT SWASTA (PELELANGAN UMUM)



41 PELABUHAN PANGKAL (23 PROVINSI)



498 PELABUHAN SINGGAH

UKURAN KAPAL 200 - 2000 DWT

PROFORMA KAPAL PERINTIS

•17,70% MELAYANI KBI

•82,29% MELAYANI KTI

SASARAN

- ✓ MENGHUBUNGAN DAERAH YANG MASIH TERTINGGAL DAN/ATAU WILAYAH TERPENCIL, TERLUAR PERBATASAN YANG BELUM BERKEMBANG DENGAN DAERAH YANG SUDAH BERKEMBANG ATAU MAJU;
- ✓ MENGHUBUNGAN DAERAH YANG MODA TRANSPORTASI LAINNYA BELUM MEMADAI;
- ✓ MENGHUBUNGAN DAERAH YANG SECARA KOMERSIAL BELUM MENGUNTUNGKAN UNTUK DILAYANI OLEH PELAKSANA KEGIATAN ANGKUTAN LAUT, ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU, ATAU ANGKUTAN PENYEBERANGAN.



3

**KEBUTUHAN STUDI DALAM RANGKA PEMENUHAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SERTA PENINGKATAN DAYA SAING
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**





DASAR HUKUM DAN ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN PELAYARAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

ANGKUTAN DI PERAIRAN

PP NO 20/2010
JO PP NO 22/2011

ISU STRATEGIS:

- Sislognas & Disparitas Wilayah
- *Cabotage & Beyond Cabotage*
- Keperintisan (Termasuk Angkutan Ternak)
- Konektivitas *Liner/Tramper Coastal & Short Sea Shipping*

KEPELABUHANAN

PP NO 61/2009 Jo
PP NO 64/2015

ISU STRATEGIS:

- TKN dan RIPN
- RIP & DLKr/DLKp
- Penyelenggaraan Pelabuhan
- Pembangunan & Pengoperasian Pelabuhan
- Tersus & TUKS
- Penarifan
- Pelabuhan dan Terminal Khusus yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri, dan
- Sistem Informasi Pelabuhan

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

PP NO 5/2010

ISU STRATEGIS:

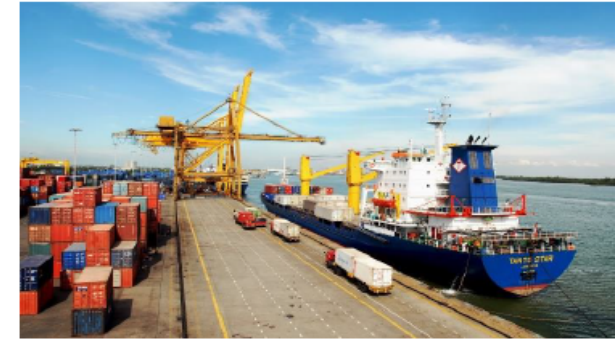
- Keselamatan Berlayar
- SBNP
- Telekomunikasi Pelayaran
- Pemanduan
- LRIT
- RPP Penjagaan Laut dan Pantai
- Pemeriksaan Kapal
- Keamanan Pelayaran Termasuk *ISPS Code*
- Investigasi Kecelakaan

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

PP NO 21/2010

ISU STRATEGIS:

- Pencegahan Pencemaran
- Penanggulangan Pencemaran
- Kelestarian Lingkungan Laut





MANDAT DAN PENUGASAN BAGI RENSTRA DITJEN HUBLA 2020-2024

REGULASI SEKTORAL

UU 17/2008 PELAYARAN
dan peraturan pelaksanaannya

Asas dan tujuan penyelenggaraan pelayaran

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

RTRWN (PP26/2008/PP13/2017) **SISLOGNAS** (PERPRES 26/2012)

RIPN (KP 432/2017)

Rencana pengembangan jaringan pelayaran dan pelabuhan secara nasional

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJPN 2005-2025 (UU 17/2007) **RPJMN 2020-2024** (naskah teknokratik)

RPJP DEPHUB 2005-2025 (KM 49/2008) **RENSTRA KEMHUB 2020-2025** (naskah teknokratik)

Arah kebijakan dan target pembangunan (sektor transportasi) periode 2020-2024

REGULASI PEMERINTAHAN

UU 23/2014 PEMDA dan perubahannya **PM 189/2015 SOTK Kemhub**

Kewenangan penyelenggaraan pelayaran Ditjen Hubla dan Pemda

- Asas penyelenggaraan pelayaran:**
- (1) manfaat
 - (2) usaha bersama & kekeluargaan
 - (3) persaingan sehat
 - (4) adil & merata tanpa diskriminasi
 - (5) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
 - (6) kepentingan umum
 - (7) keterpaduan
 - (8) tegaknya hukum
 - (9) kemandirian
 - (10) berwawasan lingkungan hidup
 - (11) kedaulatan negara
 - (12) kebangsaan

- **RTRWN:** tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran
- **Sislognas:** logistik maritim dengan PIH (Kuala Tanjung dan Bitung) didukung SSS dan logistik laut pedalaman
- **RIPN:** pengembangan 30 pelabuhan utama, 189 pelabuhan pengumpul, 174 pelabuhan pengumpan regional, dan 243 pelabuhan pengumpan lokal

- **Sasaran RPJPN 2005-2025:** Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain
- **Visi RPJP Dephub 2005-2025:** Terwujudnya pelayanan transportasi yang **HANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH**
- **Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2025:** integrasi pelabuhan dengan KI; konektivitas laut via jaringan, e-logistik, dan multimoda serta Penanganan terpadu keselamatan transportasi

- **UU 23/2014:** Pembagian urusan pemerintahan bidang pelayaran (Lampiran I Bagian O.2)
- **PM 189/2015:** tugas dan fungsi Ditjen Perhubungan Laut

RENSTRA DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 2020-2024

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Ditjen Perhubungan Laut dalam penyelenggaraan bidang pelayaran/ transportasi laut sesuai UU 17/2008 dengan fokus pembangunan sesuai arahan Rencana Pembangunan Nasional



ISU STRATEGIS BIDANG PELAYARAN



SUMBER DAYA MANUSIA

- Kualitas, kuantitas, dan penempatan SDM
- Kualitas dan kuantitas SDM operator dan mitra kerja



PENDANAAN

- Kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan APBN
- Belum berkembangnya skema pendanaan alternatif



SARANA & PRASARANA

- Konektivitas, integrasi, dan pemerataan
- Kondisi dan keandalan
- NCVS dan pelayaran rakyat
- Kapasitas dan produktivitas
- Compliance to standard



TEKNOLOGI & INFORMASI

- Update aplikasi teknologi di bidang pelayaran
- Pemanfaatan TIK di lingkungan Ditjen Hubla



REGULASI & KEBIJAKAN

- Ratifikasi regulasi internasional di bidang pelayaran
- Transformasi regulasi bidang pelayaran nasional



KELEMBAGAAN

- Penguatan kelembagaan Ditjen Hubla (tata kelola dan organisasi)
- Sinergi antar K/L yang terkait
- Pembagian kewenangan



MANAJEMEN IMPLEMENTASI

- Kesiapan teknis
- Isu KDP/multi year
- Pembebasan lahan
- Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur



KINERJA & DAMPAK

- Biaya logistik nasional
- Kinerja pelayanan pelabuhan
- Keselamatan dan keamanan
- Optimalisasi subsidi dan PSO
- Daya saing industri pelayaran



ARAH KEBIJAKAN UTAMA TRANSPORTASI LAUT TAHUN 2020-2024

1 Perwujudan logistik maritim di dalam negeri

- Mengembangkan jaringan pelayaran komersil, perintis/subsidi (tol laut, ternak) dan pelayaran rakyat untuk menyediakan konektivitas dan distribusi barang pokok dan penting ke wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan

2 Peningkatan konektivitas terhadap jaringan pelayaran internasional

- Mendorong pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dapat menjadi pelabuhan singgah dari rute utama pelayaran dunia, antara lain Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Patimban, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung

3 Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional dan pelabuhan pendukung tol laut

- Pengembangan pelabuhan pendukung tol laut (termasuk Pelabuhan Hub Internasional di Kuala Tanjung, Tj Priok dan Bitung)

4 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan

- Pemenuhan kecukupan serta kondisi/keandalan sarana dan prasarana SBNP, telekomunikasi pelayaran, kapal patroli, dan sarana/prasarana kerja lainnya, serta keselamatan dan perlindungan maritim

5 Peningkatan *compliance* terhadap standar/regulasi internasional

- Ratifikasi dan pelaksanaan sejumlah regulasi/standar pelayaran yang berlaku secara internasional sebagai upaya awal perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia

6 Peningkatan keterpaduan antarmoda dan antar wilayah

- Peningkatan konektivitas antarmoda transportasi di pelabuhan untuk mendukung pengembangan kawasan (terutama KSPN, KEK, KI)



1 Peningkatan Teknologi Informasi

Peningkatan dan pengembangan Inaportnet dan *DO Online*, pengembangan Vessel Traffic Services (VTS) dan alat telekomunikasi pelayaran yang lainnya

2 Pemanfaatan Pembiayaan Alternatif

Pemanfaatan Pembiayaan Alternatif melalui skema KPBU, antara lain 14 pelabuhan, KSP pada 21 Pelabuhan, SBSN untuk pengembangan 1 lokasi Pelabuhan dan 6 lokasi Vessel Traffic Services (VTS)

3 Peningkatan Kualitas Keselamatan dan Pelayanan Publik di Pelabuhan

Peningkatan keselamatan dan pelayanan pelabuhan dengan merevitalisasi pelabuhan dan implementasi ticketing online pada 6 pelabuhan percontohan (*Pilot Project*) (Pelabuhan Kaliadem, Bau-Bau, Tulehu, Tanjung Pinang, Surabaya dan Tarakan)

4 Revitalisasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Laut

Peningkatan efektivitas kinerja UPT dan Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dengan penyesuaian struktur organisasi dan tugas serta fungsi disesuaikan perkembangan (berikut penyediaan kebutuhan SDM)



PROGRAM PEMENUHAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

1

PENGERUKAN ALUR PELAYARAN

Pengerukan Alur Pelayaran merupakan pekerjaan untuk memperdalam suatu perairan pada alur pelayaran dimana kegiatan tersebut terbagi atas 2 jenis yaitu *capital* dan *maintenance*.



2

PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP)

Sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal. SBNP berupa Menara Suar, Rambu Suar dan Pelampung Suar



3

TELEKOMUNIKASI PELAYARAN

Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

4

PEMBANGUNAN KAPAL NEGARA KENAVIGASIAN

Kapal negara yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat mendekati Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran



5

PEMBANGUNAN KAPAL PATROLI KPLP

Kapal negara yang melaksanakan tugas patroli dalam rangka menegakkan peraturan dan perundang-undang bidang pelayaran dan penertiban serta pengawasan keselamatan pelayaran. Selain itu juga juga melaksanakan patroli menanggulangi pencemaran di laut, penanggulangan kebakaran di laut, serta penanggulangan musibah di laut dan SAR.





PERENCANAAN PEMBANGUNAN / PENGEMBANGAN PELABUHAN

SESUAI UU NO 17 TAHUN 2008



Berdasarkan PM 112 Tahun 2017
Seluruh lokasi pelabuhan wajib mengikuti proses perencanaan
Pembangunan /pengembangan pelabuhan



SUBSTANSI PM 112 TAHUN 2017 PADA TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PELABUHAN

PELABUHAN UTAMA & PELABUHAN PENGUMPUL

Studi Kelayakan

Rencana Induk Pelabuhan

Studi Investigasi Desain / Detail Engineering Desain

Pra Studi Kelayakan

PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL DAN PENGUMPAN LOKAL

**Studi Kelayakan – Rencana Induk Pelabuhan –
Studi Investigasi Desain / Detail Engineering Desain**



Pra Studi Kelayakan



Studi Kelayakan



**Rencana Induk Pelabuhan – Studi Investigasi
Desain / Detail Engineering Desain**

Penyusunan dokumen Pra Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan yang tidak terlepas dari kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Daerah yaitu RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota serta Dokumen Tatrabil dan Tatraklok Daerah



STUDI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



DIT. LALA

- Studi Desain Kapal
- Studi Konektivitas
- Studi Evaluasi Tol Laut dan Keperintisan



DIT. KAPPEL

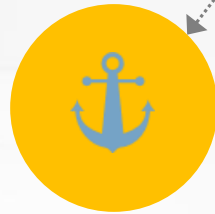
- Kajian Kapal Indonesia yang telah memenuhi aturan SOLAS

STUDI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



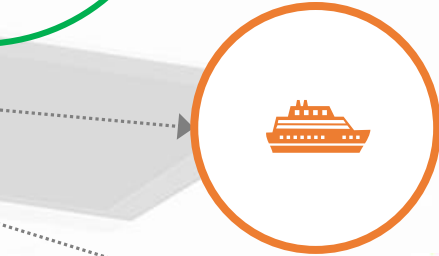
DIT KEPELABUHANAN

- Studi FS, RIP, KPBU, Lingkungan
- SID dan DED
- SID Pengerukan
- Studi Pelayanan Minimum Pandu Tunda
- Studi DLKR/DLKP dan Kebutuhan Alat Bongkar Muat



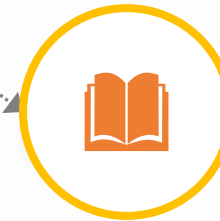
DIT. KPLP

- Studi Kerawanan Wilayah
- Studi Patroli Laut
- Studi Pengembangan Pangkalan KPLP
- Studi Desain Kapal Patroli



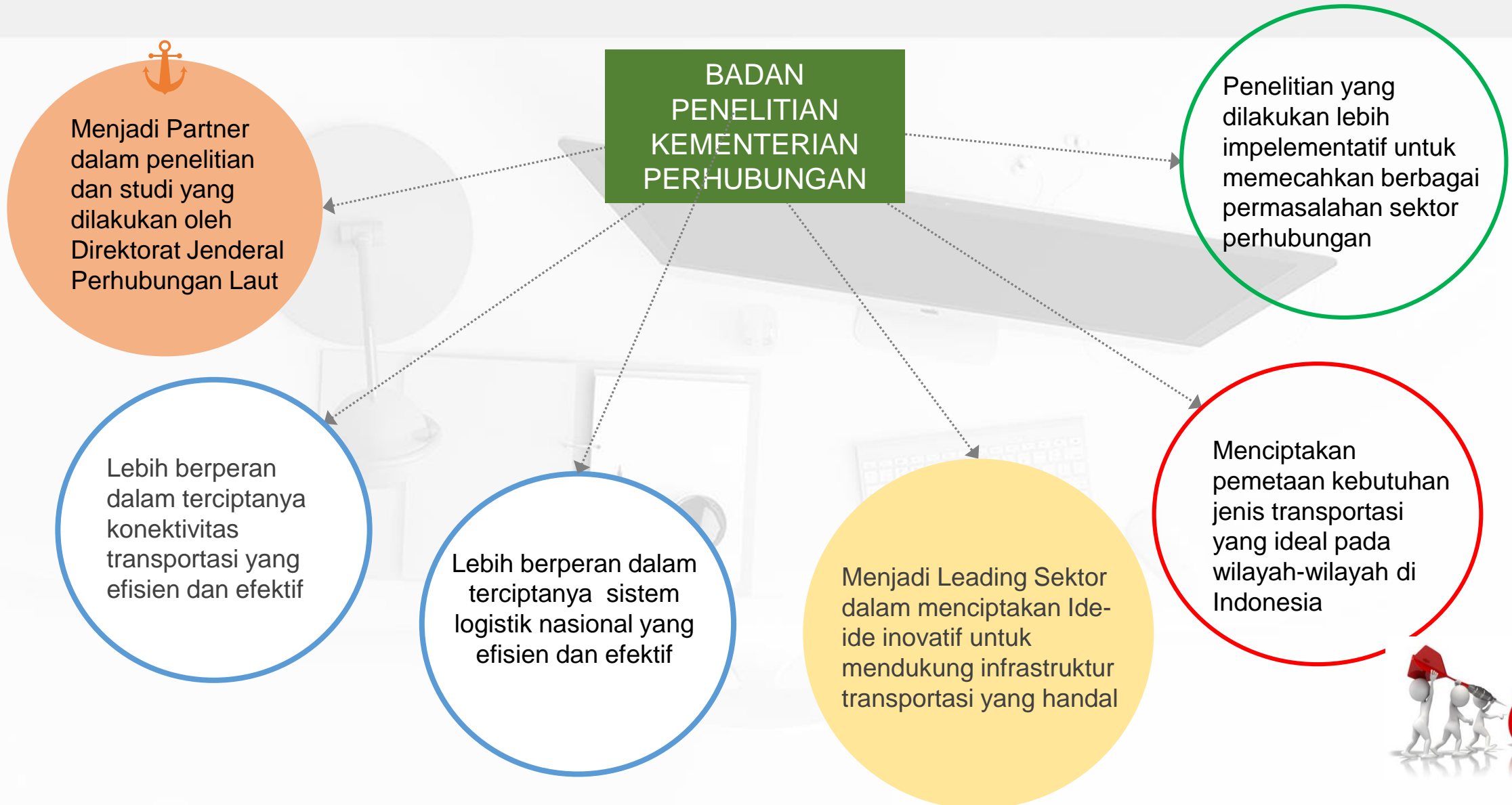
DIT. KENAVIGASIAN

- Studi Penataan Alur Pelayaran
- Studi Pengembangan Dermaga Kenavigasian





HARAPAN SEKTOR PERHUBUNGAN TERHADAP REVITALISASI BADAN LITBANG



IDENTIFIKASI ARAH KEBUTUHAN STUDI TRANSPORTASI LAUT

Logistic Performance Index



- RENCANA STRATEGIS
- ARAH KEBIJAKAN
- RENCANA INDUK
- DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS
- DLL

STUDI YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LITBANG TERKAIT LOGISTIK NASIONAL DAN KONEKTIVITAS:

- Studi Pendukung Peningkatan Logistic Performance Index Indonesia
- Pemetaan Tarif Logistik Indonesia
- Pengukuran Kinerja Pelabuhan
- Studi Integrasi Antar Moda
- Standarisasi logistik untuk alih moda
- Pengaruh biaya logistik terhadap PDB

- Studi Penurunan Biaya Logistik
- Jaringan Transportasi kepulauan
- Peran Pemda dan Swasta dalam mendukung konektivitas
- Karakter pergerakan barang dan orang di wilayah kepulauan
- Reviuw Angkutan Perintis
- Studi Analisa Standar Harga Satuan

STUDI TERKAIT TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA ARAH KEBIJAKAN DITJEN HUBLA antara lain :

Rencana Induk Setiap Direktorat di Lingkungan Ditjen Hubla

Studi Perencanaan Pembangunan / Pengembangan / Pengerukan Pelabuhan

Studi Penunjang Pemenuhan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran

Studi Standarisasi dan Spesifikasi Fasilitas Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut

Studi Pembentukan Badan Layanan Umum di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut



Terima Kasih
